

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Asmara, Kidung dan Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2009.
- Damanik, Jayadi. *Ringkasan Eksekutif Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Sinkil*. Jakarta: Komnas HAM RI. 2017.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fuadi, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Gunakaya, A. Widiada. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.
- Irsan, Koesparmono. *Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2004
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pusaka Setia. 2015.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Komnas HAM RI. *Data Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM. 2020.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. 1983.

- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nuridha, Sigit Dwi. *Mengenal Ham*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. 2019.
- Pasek, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2018.
- Rahman, M. Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. 2011.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aflikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persana. 1993.
- Suntoro, Agus. *et.al. Kajian Komnas HAM RI atas PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadat*. Jakarta: Komnas HAM RI. 2020.
- Suporahardjo. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin. 2000.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. 2016.

B. Jurnal

- Maulana, Mohammad dan Nur Akifah Janur, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya*. Jurnal Qisthosia, Vol.1, No.2, 2020.
- Mayyasya, Dizafia Zafira, *et. al., Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baktis Indonesia Di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang)*. Interaksi Online, Vol. 10 No. 2. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementrian Agama.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat Di Kota Kupang.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Mendirikan Rumah Ibadat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009

D. Sumber Lainnya

Akroman, Panji. 2010. *Problema Pendirian Rumah Ibadat*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana ushuludiin di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Anonim, *Ketika Pembangunan Gereja (Lagi-lagi) Dilarang: Kasus Bekasi*, <https://www.kompasiana.com/ade Armando24/551f5d6681331151019df99a/ketika-pembangunan-gereja-lagilagi-dilarang-kasus-bekasi>.

Anonim, *Wali Kota Cilegon Tandatangani Penolakan Gereja: Keinginan Warga*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908182806-20-845255/wali-kota-cilegon-tandatangani-penolakan-gereja-keinginan-warga>.

- Anonim. *Pendirian Gereja Ditolak: Penantian 15 Tahun Jemaat, warganet pertanyakan langkah wali kota, Inilah Namanya toleransi*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957>. 18 Maret 2023.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Eksekutif Summary: Memperkuat Peran Pemerintah Kota Cilegon Dalam Mengikis Prasangka Terhadap Pendirian Rumah Ibadat Dan Memfasilitasi Pendirian Rumah Ibadat. BLA Jakarta: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2022. Provinsi Banten Dalam Angka. Banten: BPS Provinsi Banten.
- Deslatama, Yandhi. *Kisruh Pendirian Gereja di Cilegon, Menag Yaqut Digugat ke Pengadilan*, <https://www.liputan6.com/news/read/5072289/kisruh-pendirian-gereja-di-cilegon-menag-yaqut-digugat-ke-pengadilan>.
- Hana Sakoya, Nakia. 2020. *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)*. Skripsi (Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lembaga Survei Indonesia. 2022. Laporan Survei Nasional: Kekerasan Ekstrem, Toleransi, dan Kehidupan Beragama di Indonesia 16-29 Mei 2022.
- Natalia, Liana. 2018. *Konflik dan Integrasi Sosial Antarumat Beragama; Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen Indonesia Gayungsari di Surabaya*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Naviola, Monica. *Rencana Detail Pembangunan Gereja HKBP di Kota Cilegon*, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/20/130000621/rencana-detail-pembangunan-gereja-hkbp-di-kota-cilegon>.
- Niman, Mikael, *Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara*, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/421380/ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara>. 18 Desember 2022.
- Putra, Dio Mandala. 2019. *Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).
- Riono, Sigit. 2015. *Hak Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Socio-Legal dalam Kasus Ahmadiyah)*. Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Semarang).
- Setara Institute. 2023. Siaran Pers Setara Institute: Indeks Kota Toleran (IKT) 2022.
- Shabrina, Nur. 2019. *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah DI Bekasi (Studi Pendirian Gereja ST. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna)*. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Silaban, Saut, *Sejarah Gereja HKBP Maranatha Cilegon*,
<https://www.youtube.com/watch?v=8dYEmZ30cDo>. 28 April 2023.

Wisnu, Yogama, *Kronologi Polemik Pembangunan GKI Yasmin 15 Tahun*,
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/yogama-wisnu/kronologi-polemik-pembangunan-gki-yasmin-selama-15-tahun>.

